



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

RENCANA KERJA 2023

**DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAMBI**

Jl. Jend. A. Thalib No. 45 Telanaipura Jambi
Telp.(0741) 62695, Fax (0741) 62751

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan rancangan Rencana Kerja adalah merupakan langkah awal OPD untuk mendesain program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun dengan mengacu pada Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

Adapun muatan dalam rancangan Rencana Kerja, adalah:

1. Pendahuluan.
2. Hasil Evaluasi Renja Tahun lalu
3. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
4. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat daerah
5. Penutup

B. Dasar Hukum

Rancangan Rencana Kerja Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2023 ini disusun dengan mempedomani:

1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang – Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

9. Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor : 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Menteri Sosial RI NO. 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten / Kota
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembagian Urusan Kewenangan Provinsi dengan Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008, tentang Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi (lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 16);
21. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021- 2026;

22. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Adapun maksud disusunnya rancangan Rencana Kerja Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2023 adalah untuk menggambarkan lebih terperinci mengenai rancangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

2. Tujuan

Sedangkan tujuan disusunnya Renja SKPD Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2023 adalah:

1. Sebagai pedoman/acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi dalam kurun waktu 1 tahun yaitu dari Tahun 2022 dan Pembuatan Rencana Kerja Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan kondisi yang diinginkan;
2. Sebagai pedoman kerja bagi aparatur Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Jambi;
3. Adanya acuan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi.

D. Sistematika Penulisan

Penulisan rancangan Rencana Kerja Tahun 2023 pada Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang penyusunan Rencana Kerja yang memuat uraian singkat, latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, struktur organisasi, sumber daya manusia serta sistematika penulisan rancangan awal Rencana Kerja.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2022

Bab ini memuat struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi dan realisasi kegiatan anggaran yang dilaksanakan Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2022.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat Rencana Kerja Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2023.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat indikator kinerja, kebutuhan dana indikatif dan sumber dana.

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2022

A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022

Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi tahun 2022 menyesuaikan ketentuan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA). Gambaran umum program dan kegiatan Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI dengan 7 kegiatan dan 16 Sub Kegiatan.
2. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL dengan 2 Kegiatan dan 5 Sub Kegiatan
3. PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN dengan 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan
4. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL dengan 5 Kegiatan dan 43 Sub Kegiatan
5. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL dengan 2 Kegiatan dan 4 Sub Kegiatan
6. PROGRAM PENANGANAN BENCANA dengan 1 Kegiatan dan 5 Sub Kegiatan
7. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN dengan 1 Kegiatan dan 3 Subkegiatan
8. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK dengan 3 Kegiatan dan 4 Sub Kegiatan
9. PROGRAM PENCATATAN SIPIL dengan 2 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan
10. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN dengan 2 Kegiatan dan 4 Sub Kegiatan
11. PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN dengan 1 Kegiatan dan 1 sub Kegiatan

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan 11 (sebelas) program yang dirinci kedalam 27 (dua puluh tujuh) kegiatan dan 88 (delapan puluh delapan) sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

DAFTAR REKAPITULASI LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANA KEGIATAN (LPPK) KEGIATAN BELANJA LANGSUNG APBD PROVINSI JAMBI TAHUN 2022
(POSISI: BULAN 31 DESEMBER 2022)

NO	SKPD/NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH DPA			PERKEMBANGAN PELAKSANAAN			SISA ANGGARAN Rp.
		APBD MURNI Rp.	PERUBAHAN Rp.	JUMLAH TOTAL Rp.	REALISASI KEUANGAN		FISIK (%) REAL	
					Rp.	%		
Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
Belanja Langsung								
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		5.890.260.281,00	136.839.870,00	6.027.100.151,00	5.542.595.897,00	91,96	91,96	484.504.254,00
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		116.031.250,00	-5.950.000,00	110.081.250,00	99.376.130,00	90,28	90,28	10.705.120,00
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	116.031.250,00		110.081.250,00	99.376.130,00	90,28	90,28	10.705.120,00
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		492.803.000,00	-35.040.000,00	457.763.000,00	424.741.940,00	92,79	92,79	33.021.060,00
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	492.803.000,00	-35.040.000,00	457.763.000,00	424.741.940,00	92,79	92,79	33.021.060,00
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah		2.480.808.482,00	-118.337.965,00	2.362.470.517,00	2.082.650.093,00	88,16	88,16	279.820.424,00
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	58.286.762,00	12.096.000,00	70.382.762,00	69.322.500,00	98,49	98,49	1.060.262,00
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.218.032.292,00	-230.269.222,00	987.763.070,00	934.741.290,00	94,63	94,63	53.021.780,00
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	74.643.000,00	4.668.212,00	79.311.212,00	79.023.013,00	99,64	99,64	288.199,00
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	71.008.300,00	4.000.000,00	75.008.300,00	59.875.750,00	79,83	79,83	15.132.550,00
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.058.838.128,00	91.167.045,00	1.150.005.173,00	939.687.540,00	81,71	81,71	210.317.633,00

4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		217.907.011,00	-71.444.165,00	146.462.846,00	123.334.052,00	84,21	84,21	23.128.794,00
1	Pengadaan Mebel	217.907.011,00	-71.444.165,00	146.462.846,00	123.334.052,00	84,21	84,21	23.128.794,00
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		752.103.798,00	2.112.000,00	754.215.798,00	657.329.699,00	87,15	87,15	96.886.099,00
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	533.025.718,00	1.742.400,00	534.768.118,00	443.014.899,00	82,84	82,84	91.753.219,00
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	219.078.080,00	369.600,00	219.447.680,00	214.314.800,00	97,66	97,66	5.132.880,00
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.830.606.740,00	365.500.000,00	2.196.106.740,00	2.155.163.983,00	98,14	98,14	40.942.757,00
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	659.700.000,00		659.700.000,00	626.994.735,00	95,04	95,04	32.705.265,00
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.092.406.740,00	345.500.000,00	1.437.906.740,00	1.430.559.248,00	99,49	99,49	7.347.492,00
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	78.500.000,00	20.000.000,00	98.500.000,00	97.610.000,00	99,10	99,10	890.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		2.975.839.684,00	-23.754.015,00	2.952.085.669,00	2.784.379.897,00	94,32	94,32	167.705.772,00
7. Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		74.997.596,00	-163.570,00	74.834.026,00	63.461.486,00	84,80	84,80	11.372.540,00
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	74.997.596,00	-163.570,00	74.834.026,00	63.461.486,00	84,80	84,80	11.372.540,00
8. Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi		2.900.842.088,00	-23.590.445,00	2.877.251.643,00	2.720.918.411,00	94,57	94,57	156.333.232,00
1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	418.589.975,00		418.589.975,00	401.035.926,00	95,81	95,81	17.554.049,00

2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	535.373.864,00		535.373.864,00	520.543.200,00	97,23	97,23	14.830.664,00
3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	1.295.140.766,00		1.295.140.766,00	1.263.715.872,00	97,57	97,57	31.424.894,00
4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan	651.737.483,00	-23.590.445,00	628.147.038,00	535.623.413,00	85,27	85,27	92.523.625,00
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN		175.000.000,00	15.000.000,00	190.000.000,00	176.368.500,00	92,83	92,83	13.631.500,00
9. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota		175.000.000,00	15.000.000,00	190.000.000,00	176.368.500,00	92,83	92,83	13.631.500,00
1	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah	175.000.000,00	15.000.000,00	190.000.000,00	176.368.500,00	92,83	92,83	13.631.500,00
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		10.958.005.768,00	614.397.760,00	11.572.403.441,00	10.451.128.291,00	90,31	90,31	1.121.275.150,00
10. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti		5.824.226.300,00	362.454.144,00	6.186.680.444,00	5.680.104.889,00	91,81	91,81	506.575.555,00
1	Penyediaan Permakanan	1.603.866.026,00	-139.377.725,00	1.464.488.301,00	1.256.547.360,00	85,80	85,80	207.940.941,00
2	Penyediaan Sandang	143.943.926,00	1.116.215,00	145.060.141,00	141.732.000,00	97,71	97,71	3.328.141,00
3	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	2.729.764.746,00	207.386.148,00	2.937.150.894,00	2.868.246.688,00	97,65	97,65	68.904.206,00
4	Penyediaan Alat Bantu	721.464.479,00	394.758.444,00	1.116.222.923,00	959.732.541,00	85,98	85,98	156.490.382,00
5	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	60.323.905,00	-8.510.668,00	51.813.237,00	51.625.900,00	99,64	99,64	187.337,00
6	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	117.159.500,00	-33.218.000,00	83.941.500,00	73.573.500,00	87,65	87,65	10.368.000,00

7	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	94.863.308,00	-680.860,00	94.182.448,00	94.175.000,00	99,99	99,99	7.448,00
8	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	12.062.400,00	-12.062.400,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
9	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	221.788.000,00	-50.617.000,00	171.171.000,00	125.976.900,00	73,60	73,60	45.194.100,00
10	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	118.990.010,00	3.659.990,00	122.650.000,00	108.495.000,00	88,46	88,46	14.155.000,00
11. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti		1.584.780.843,00	9.755.240,00	1.594.536.083,00	1.339.608.086,00	84,01	84,01	254.927.997,00
1	Pengasuhan	2.897.156,00		2.897.156,00	2.655.826,00	91,67	91,67	241.330,00
2	Penyediaan Makanan	324.092.961,00	-145.530,00	323.947.431,00	246.316.331,00	76,04	76,04	77.631.100,00
3	Penyediaan Sandang	64.803.730,00	6.500.000,00	71.303.730,00	66.437.059,00	93,17	93,17	4.866.671,00
4	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	802.920.772,00	70.511.268,00	873.432.040,00	815.466.210,00	93,36	93,36	57.965.830,00
5	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	3.059.496,00	7.038.564,00	10.098.060,00	6.083.496,00	60,24	60,24	4.014.564,00
6	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	75.405.727,00	-700.000,00	74.705.727,00	60.262.309,00	80,67	80,67	14.443.418,00
7	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	91.499.290,00	-27.800.000,00	63.699.290,00	44.168.355,00	69,34	69,34	19.530.935,00
8	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	56.770.711,00	9.240.938,00	66.011.649,00	27.445.500,00	41,58	41,58	38.566.149,00
9	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	163.331.000,00	-54.890.000,00	108.441.000,00	70.773.000,00	65,26	65,26	37.668.000,00
12. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti		2.238.251.914,00	101.178.423,00	2.339.430.337,00	2.071.479.168,00	88,55	88,55	267.951.169,00
1	Penyediaan Permakanan	799.131.000,00		799.131.000,00	580.528.085,00	72,64	72,64	218.602.915,00
2	Penyediaan Sandang	189.683.260,00		189.683.260,00	188.633.243,00	99,45	99,45	1.050.017,00
3	Penyediaan Asrama yang mudah Diakses	1.013.707.646,00	96.781.579,00	1.110.489.225,00	1.103.298.410,00	99,35	99,35	7.190.815,00
4	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	9.407.634,00	-517.450,00	8.890.184,00	8.890.184,00	100,00	100,00	0,00

5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	27.900.000,00	1.800.000,00	29.700.000,00	29.700.000,00	100,00	100,00	0,00
6	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	74.135.007,00		74.135.007,00	73.855.400,00	99,62	99,62	279.607,00
7	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	3.450.000,00		3.450.000,00	3.450.000,00	100,00	100,00	0,00
8	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	27.357.367,00	2.680.294,00	30.037.661,00	30.022.962,00	99,95	99,95	14.699,00
9	Pemulasaraan	59.840.000,00		59.840.000,00	21.542.360,00	36,00	36,00	38.297.640,00
10	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	33.640.000,00	434.000,00	34.074.000,00	31.558.524,00	92,62	92,62	2.515.476,00
13. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti		463.900.134,00	48.537.666,00	512.437.800,00	474.441.071,00	92,59	92,59	37.996.729,00
1	Penyediaan Permakanan	162.607.500,00	-135.035.100,00	27.572.400,00	13.797.000,00	50,04	50,04	13.775.400,00
2	Penyediaan Sandang	69.163.970,00	8.078.101,00	77.242.071,00	73.865.778,00	95,63	95,63	3.376.293,00
3	Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses	85.154.400,00	136.617.666,00	221.772.066,00	213.997.666,00	96,49	96,49	7.774.400,00
4	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	35.631.407,00	8.550.131,00	44.181.538,00	40.191.186,00	90,97	90,97	3.990.352,00
5	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	13.269.857,00	50.129.497,00	63.399.354,00	63.396.515,00	100,00	100,00	2.839,00
6	Pemulangan ke Daerah Asal	98.073.000,00	-19.802.629,00	78.270.371,00	69.192.926,00	88,40	88,40	9.077.445,00
14. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam		846.846.577,00	92.472.287,00	939.318.777,00	885.495.077,00	94,27	94,27	53.823.700,00
1	Penyediaan Permakanan	175.957.500,00	-144.335.100,00	31.622.400,00	30.969.000,00	97,93	97,93	653.400,00
2	Penyediaan Sandang	30.019.127,00	29.689.808,00	59.708.935,00	59.262.700,00	99,25	99,25	446.235,00

3	Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses	467.684.000,00	122.141.187,00	589.825.187,00	588.696.000,00	99,81	99,81	1.129.187,00
4	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	6.709.964,00	495.000,00	7.204.964,00	7.083.190,00	98,31	98,31	121.774,00
5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	72.967.600,00		72.967.513,00	72.767.400,00	99,73	99,73	200.113,00
6	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	24.019.681,00	20.557.188,00	44.576.869,00	43.365.987,00	97,28	97,28	1.210.882,00
7	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	17.948.700,00		17.948.700,00	17.598.500,00	98,05	98,05	350.200,00
8	Pemulangan ke Daerah Asal	51.540.005,00	63.924.204,00	115.464.209,00	65.752.300,00	56,95	56,95	49.711.909,00
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		1.748.132.226,00	132.653.883,00	1.880.786.109,00	1.779.614.891,00	94,62	94,62	101.171.218,00
15. Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal		149.138.588,00	-2.828.000,00	146.310.588,00	131.129.191,00	89,62	89,62	15.181.397,00
1	Pengangkatan Anak antar WNI	149.138.588,00	-2.828.000,00	146.310.588,00	131.129.191,00	89,62	89,62	15.181.397,00
16. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi		1.598.993.638,00	135.481.883,00	1.734.475.521,00	1.648.485.700,00	95,04	95,04	85.989.821,00
1	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	117.735.878,00	180.000.000,00	297.735.878,00	290.326.000,00	97,51	97,51	7.409.878,00
2	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	741.257.760,00	-44.518.117,00	696.739.643,00	618.159.700,00	88,72	88,72	78.579.943,00
3	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	740.000.000,00		740.000.000,00	740.000.000,00	100,00	100,00	0,00
PROGRAM PENANGANAN BENCANA		985.196.020,00	34.463.700,00	1.019.659.720,00	922.625.797,00	90,48	90,48	97.033.923,00
17. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi		985.196.020,00	34.463.700,00	1.019.659.720,00	922.625.797,00	90,48	90,48	97.033.923,00
1	Penyediaan Permakanan	200.000.000,00	34.463.700,00	234.463.700,00	229.292.079,00	97,79	97,79	5.171.621,00
2	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	38.974.600,00		38.974.600,00		0,00	0,00	38.974.600,00

3	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	153.466.500,00		153.466.500,00	139.651.901,00	91,00	91,00	13.814.599,00
4	Pelayanan Dukungan Psikososial	592.754.920,00		592.754.920,00	553.681.817,00	93,41	93,41	39.073.103,00
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		659.651.098,00	-31.040,00	659.620.058,00	631.683.312,00	95,76	95,76	27.936.746,00
18. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi		659.651.098,00	-31.040,00	659.620.058,00	631.683.312,00	95,76	95,76	27.936.746,00
1	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	299.293.930,00	-8.640,00	299.285.290,00	291.047.800,00	97,25	97,25	8.237.490,00
2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	195.419.912,00	-22.400,00	195.397.512,00	183.407.212,00	93,86	93,86	11.990.300,00
3	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	164.937.256,00		164.937.256,00	157.228.300,00	95,33	95,33	7.708.956,00
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		598.430.106,00	99.358.672,00	697.788.778,00	581.977.124,00	83,40	83,40	115.811.654,00
19. Pelayanan Pendaftaran Kependudukan		116.784.694,00	1.909.872,00	118.694.566,00	84.713.731,00	71,37	71,37	33.980.835,00
1	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	15.370.000,00	2.407.000,00	17.777.000,00	15.511.600,00	87,26	87,26	2.265.400,00
2	Pendataan Penduduk NonPermanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	101.414.694,00	-497.128,00	100.917.566,00	69.202.131,00	68,57	68,57	31.715.435,00
20. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan		481.645.412,00	97.448.800,00	579.094.212,00	497.263.393,00	85,87	85,87	81.830.819,00
1	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	121.743.620,00	12.128.800,00	133.872.420,00	92.867.767,00	69,37	69,37	41.004.653,00
2	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	359.901.792,00	85.320.000,00	445.221.792,00	404.395.626,00	90,83	90,83	40.826.166,00
PROGRAM PENCATATAN SIPIL		368.442.256,00	30.129.600,00	398.571.856,00	337.291.486,00	84,63	84,63	61.280.370,00
21. Pelayanan Pencatatan Sipil		118.160.100,00	-11.576.400,00	106.583.700,00	75.338.129,00	70,68	70,68	31.245.571,00
1	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	118.160.100,00	-11.576.400,00	106.583.700,00	75.338.129,00	70,68	70,68	31.245.571,00

22. Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		250.282.156,00	41.706.000,00	291.988.156,00	261.953.357,00	89,71	89,71	30.034.799,00
1	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	250.282.156,00	41.706.000,00	291.988.156,00	261.953.357,00	89,71	89,71	30.034.799,00
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		776.146.166,00	-30.516.000,00	745.630.166,00	660.244.792,00	88,55	88,55	85.385.374,00
23. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi		152.774.100,00	-12.438.000,00	140.336.100,00	123.413.759,00	87,94	87,94	16.922.341,00
1	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	78.123.100,00	-5.000.000,00	73.123.100,00	64.595.740,00	88,34	88,34	8.527.360,00
2	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	74.651.000,00	-7.438.000,00	67.213.000,00	58.818.019,00	87,51	87,51	8.394.981,00
24. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi		623.372.066,00	-18.078.000,00	605.294.066,00	536.831.033,00	88,69	88,69	68.463.033,00
1	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	359.154.866,00	-12.350.000,00	346.804.866,00	316.982.429,00	91,40	91,40	29.822.437,00
2	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	264.217.200,00	-5.728.000,00	258.489.200,00	219.848.604,00	85,05	85,05	38.640.596,00
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		34.095.880,00	-6.058.133,00	28.037.747,00	24.490.700,00	87,35	87,35	3.547.047,00
25. Penyediaan Profil Kependudukan		34.095.880,00	-6.058.133,00	28.037.747,00	24.490.700,00	87,35	87,35	3.547.047,00
1	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	4.019.280,00		4.019.280,00	2.463.000,00	61,28	61,28	1.556.280,00
2	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	30.076.600,00	-6.058.133,00	24.018.467,00	22.027.700,00	91,71	91,71	1.990.767,00

	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	25.169.199.485,00	1.002.484.297,00	26.171.683.695,00	23.892.400.687,00	91,29	91,291	2.280.037.095,00
			0			10341	0341	0
Belanja Tidak Langsung								
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		17.173.683.524,00	-562.294.298,00	16.611.389.226,00	16.428.580.247,00	98,90	98,90	182.808.979,00
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.173.683.524,00	-562.294.298,00	16.611.389.226,00	16.428.580.247,00	98,90	98,90	182.808.979,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	17.173.683.524,00	-562.294.298,00	16.611.389.226,00	16.428.580.247,00	98,90	98,90	182.808.979,00
JUMLAH		42.342.883.009,00	440.189.999,00	42.783.072.921,00	40.320.980.934,00	94,25	94,25	2.462.091.987,00
								0

Dan penjabaran sasaran capaian kinerja yang ditetapkan sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI dengan Indikator Predikat AKIP Perangkat Daerah.
Pagu anggaran sebesar Rp. **6.027.100.151,00** dan **Realisasi Keuangan sebesar Rp. 5.542.595.897,00 (91.96%)**

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL dengan indikator Kinerja Persentase peningkatan Kualitas Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Program Kessos
Pagu Anggaran sebesar Rp. **2.952.085.669,00** dan **Realisasi Keuangan sebesar Rp. 2.784.379.897,00 (94.32%)**

3. PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN dengan Indikator Kinerja Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasana yang di fasilitasi
Pagu Anggaran sebesar Rp. **190.000.000,00** dan **Realisasi keuangan sebesar Rp. 176.368.500,00 (92.83%)**

4. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL dengan Indikator Kinerja Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial
Pagu Anggaran sebesar Rp. **11.572.403.441,00** dan **Realisasi Keuangan sebesar Rp. 10.451.128.291,00 (90.31%)**

5. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL dengan Indikator Kinerja Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan perlindungan dan Jaminan Sosial
Pagu Anggaran sebesar Rp. **1.880.786.109,00** dan **Realisasi Keuangan sebesar Rp. 1.779.614.891,00 (94.62%)**

6. PROGRAM PENANGANAN BENCANA dengan Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Kebutuhan Korban Bencana Sesuai SPM
Pagu Anggaran sebesar Rp. **1.019.659.720,00** dan **Realiasasi Keuangan sebesar Rp. 922.625.797,00 (90.48 %)**

7. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN dengan Indikator Kinerja Persentase pewujudan Nilai-nilai Kepahlawanan
Pagu Anggaran sebesar Rp. **659.620.058,00** dan **Realisasi keuangan sebesar Rp. 631.683.312,00 (95.76%)**

8. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Dengan Indikator Kinerja Persentase Pencapaian Layanan Pendaftaran Penduduk
Pagu Anggaran sebesar Rp. **697.788.778,00** dan **Realisasi keuangan sebesar Rp. 581.977.124,00 (83.40%)**

9. PROGRAM PENCATATAN SIPIL dengan Indikator Kinerja Persentase Pencapaian Pencatatan Sipil
Pagu Anggaran sebesar Rp. **398.571.856,00** dan **Realisasi Keuangan sebesar Rp. 337.291.486,00 (84.63%)**

10. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN dengan Indikator Kinerja Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Pagu Anggaran sebesar Rp. 745.630.166,00 dan Realisasi Keuangan sebesar Rp. 660.244.792,00 (88.55%)

11. PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN dengan indikator kinerja Persentase pengeluaran Profil Kependudukan
Pagu Anggaran sebesar Rp. 28.037.747,00 dan Realisasi Keuangan sebesar Rp. 24.490.700,00 (87.35%)

B. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi

1. Pelayanan Umum

Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi sebagai lembaga teknis daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi jambi, dalam melaksanakan kegiatan dalam kedudukannya yang mengacu pada Peraturan Gubernur Jambi Nomor 44 tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi. Pelayanan Organisasi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi, adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pelayanan administrasi dengan berorientasi pada peningkatan kinerja dan kebutuhan pelayanan.
- b. Meningkatkan ketersediaan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang efektif sesuai dengan proporsi kerja yang dibebankan kepada SKPD.
- c. Meningkatkan disiplin aparatur melalui pemenuhan kebutuhan aparatur yang efektif dan efisien.
- d. Meningkatkan kapasitas dan SDM aparatur melalui pembinaan dan peningkatan pengetahuan aparatur.
- e. Meningkatkan Sistem Pengembangan Sistem Pelaporan Organisasi, melalui penajaman visi dan misi organisasi dan Pemerintah

Provinsi Jambi ke dalam Perencanaan yang tepat sesuai kebutuhan pelayanan sektor publik.

- f. Meningkatkan ketersediaan Basis Data Terpadu PMKS dan PSKS dalam rangka penentuan arah dan kebijakan penyelenggaraan pembangunan Kessos.

2. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dengan memperhatikan analisis lingkungan eksternal dan internal, isu strategis Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi dalam tahun 2023 adalah sebagai berikut :

a. Isu Strategis Bidang Sosial

Adapun yang menjadi *Isu Strategis* dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Provinsi Jambi adalah :

- Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS PSKS yang belum optimal.
- Proses Verval DTKS Provinsi Jambi yang masih terkendala pada Kabupaten/Kota yang tidak mengganggu Verifikasi dan Validasi DTKS.
- Pemberdayaan PMKS dan PSKS belum berorientasi kepada peningkatan produktivitas dan Keberfungsian Sosial.
- Sarana dan Prasarana Panti dalam penerapan SPM belum memadai.

b. Isu Strategis Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Adapun yang menjadi *Isu Strategis* dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi Jambi adalah :

- Belum optimalnya pengelolaan dan pendataan penduduk di Kabupaten/Kota, hal ini ditandai dengan adanya penduduk yang belum terdaftar sehingga tidak memiliki identitas, distribusi penduduk pindah dan datang, dan pencatatan ke dalam dokumen kependudukan.
- Masih terdapat jumlah penduduk yang tidak tercatat dalam pencatatan sipil kependudukan, antara lain pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, pewarganegaraan, dan pengelolaan dokumen pencatatan sipil.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

Rancangan Rencana Kerja Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi tahun 2023 sesuai dengan Rencana Strategis.

Untuk mengukur input dan output perlu indikator yang jelas dari setiap kegiatan karena indikator kinerja adalah merupakan alat ukur yang spesifik secara kuantitatif dan atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan atau dampak yang menggambarkan tingkat capai kinerja suatu program atau kegiatan.

A. Tujuan dan Sasaran Program/Kegiatan Tahun 2023

Pada Tahun 2023 mendatang Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi masih melaksanakan program/kegiatan seperti tahun 2022 .

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program serta Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (output)	Target
A	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase peningkatan Kualitas Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Program Kessos	7,5%
1	<i>Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam daerah Kabupaten/Kota</i>	Persentase Izin pengumpulan sumbangan lintas daerah kab/kota dalam 1 Provinsi	17,5%
	Koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang/barang	Jumlah dokumen Hasil koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang/barang	35 Dokumen

2	<i>Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi</i>	Persentase PSKS yang terlibat dalam Pelayanan Pembangunan Kesejahteraan Sosial	2,3%
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah orang mendapat peningkatan kapasitas pekerja sosial masyarakat kewenangan Provinsi	50 Orang
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang meningkat kapasitasnya	50 Orang
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga yang meningkat kapasitasnya	641 Keluarga
	Peningkatan kemampuan potensi Sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan provinsi	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan provinsi	5 Lembaga
B	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang difasilitasi	40%
1	<i>Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik debarkasi di daerah Provinsi untuk dipulangkan ke daerah Kab/kota asal</i>	<i>Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan</i>	40%
	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara migran Korban Tindak Kekerasan dari titik debarkasi di Provinsi untuk dipulangkan ke daerah Kabupaten/Kota asal	Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan dari titik debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Kabupaten/Kota	650 Orang

C	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	0,7%
1	<i>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar di dalam panti</i>	<i>Persentase Penyandang Disabilitas terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial dalam panti</i>	<i>2,0%</i>
	Penyediaan Permakanan	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal Kewenangan Provinsi	150 Orang
	Penyediaan sandang	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan provinsi	150 Orang
	Penyediaan Asrama yang mudah di Akses	Jumlah orang yang terakses asrama layak huni kewenangan provinsi	6 Orang
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan Provinsi	1 Orang
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam panti	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan kesehatan di dalam panti kewenangan Provinsi	1 Orang
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah peserta bimbingan fisik , mental dan spiritual kewenangan Provinsi	1 Orang
	Pemberian Bimbingan Aktifitas Hidup Sehari hari	Jumlah peserta Bimbingan aktivitas hidupsehari hari kewenangan Provinsi	1 Orang
	Fasilitasi Pembuatan nomor induk kependudukan bagi penyandang di sabilitas	Jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan pembuatan nomor induk kependudukan bangi penyandang disabilitas kewenangan Provinsi	1 Orang
	Akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar	Jumlah Orang yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan Provinsi	1 Orang
	pemberian pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan Pelayanan penelusuran keluarga kewenangan Provinsi	1 Orang
	pemberian pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan Provinsi	1 Orang
	Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan bidang rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar Disabilitas Terlantar dalam panti	1 Dokumen

2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Persentase Anak terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial dalam panti	0,22%
	Pengasuhan	Jumlah anak yang yang mendapatkan layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	50 Orang
	Penyediaan Makanan	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal Kewenangan Provinsi	50 Orang
	Penyediaan sandang	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan provinsi	50 Orang
	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah orang yang terakses asrama layak huni kewenangan provinsi	4 Orang
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan kesehatan di dalam panti kewenangan Provinsi	1 Orang
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah peserta bimbingan fisik , mental dan spiritual kewenangan Provinsi	1 Orang
	Pemberian Bimbingan Aktifitas Hidup Sehari hari	Jumlah peserta Bimbingan aktivitas hidupsehari hari kewenangan Provinsi	1 Orang
	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan dan kartu identitas anak	Jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan pembuatan nomor induk kependudukan bdan kartu identitas bagi anak terlantar kewenangan Provinsi	1 Orang
	Akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar	Jumlah Orang yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan Provinsi	1 Orang
	pemberian pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan Pelayanan penelusuran keluarga kewenangan Provinsi	1 Orang
	pemberian pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan Provinsi	1 Orang
	Akses layanan Pengasuhan kepada keluarga Pengganti	Jumlah orang yang mendapatkan pengasuhan keluarga pengganti kewenangan provinsi	1 Orang
	Koordinasi, Sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan pembinaan rehabilitasi sosial anak terlantar di dalam panti	1 Dokumen

3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lansia Terlantar di Dalam Panti	Persentase Lansia terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial dalam panti	0,36%
	Penyediaan Permakanan	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal Kewenangan Provinsi	72 Orang
	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan provinsi	72 Orang
	Penyediaan Asrama yang mudah Diakses	Jumlah orang yang terakses asrama layak huni kewenangan provinsi	72 Orang
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan Provinsi	72 Orang
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan kesehatan di dalam panti kewenangan Provinsi	72 Orang
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah peserta bimbingan fisik , mental dan spiritual kewenangan Provinsi	72 Orang
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah peserta Bimbingan aktivitas hidup sehari hari kewenangan Provinsi	72 Orang
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan pembuatan nomor induk kependudukan bagi lanjut usia terlantar kewenangan Provinsi	72 Orang
	Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan Provinsi	72 Orang
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan Pelayanan penelusuran keluarga kewenangan Provinsi	72 Orang
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan Provinsi	72 Orang
	Pemulasaran	Jumlah Pemulasaran kewenanga Provinsi	20 Orang
	Koordinasi, Sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan Rehabilitasi sosial dasar Lansia terlantar di dalam panti	Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan pembinaan rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar di dalam panti	72 Orang

4	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial dalam panti	15,60%
	Penyediaan Permakanan	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal Kewenangan Provinsi	15 Orang
	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan provinsi	15 Orang
	Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses	Jumlah orang yang terakses asrama layak huni kewenangan provinsi	15 Orang
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan kesehatan di dalam panti kewenangan Provinsi	15 Orang
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah peserta bimbingan fisik , mental dan spiritual kewenangan Provinsi	15 Orang
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah peserta Bimbingan aktivitas hidup sehari hari kewenangan Provinsi	15 Orang
	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah orang yang diberikan bimbingan keterampilan dasar kewenangan Provinsi	15 Orang
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	Jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan pembuatan nomor induk kependudukan , akta kelahiran, surat nikah dan/atau identitas gelandangan bagi gelandangan dan pengemis kewenangan Provinsi	15 Orang
	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan provinsi	15 Orang

	Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah gelandangan dan pengemis/keluarga yang dipulangan ke daerah asal kewenangan Provinsi	15 Orang
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan pembinaan rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis di dalam panti	15 Dokumen
5	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Persentase Tuna Susila yang mendapatkan pelayanan sosial dalam panti	22,09%
	Penyediaan Permakanan	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal Kewenangan Provinsi	15 Orang
	Penyediaan sandang	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan provinsi	15 Orang
	Penyediaan Asrama/wisma yang mudah di akses	Jumlah orang yang terakses asrama layak huni kewenangan provinsi	15 Orang
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan dalam panti	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan kesehatan di dalam panti kewenangan Provinsi	15 Orang
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah peserta bimbingan fisik , mental dan spiritual kewenangan Provinsi	15 Orang
	Pemberian Bimbingan Aktifitas Hidup Sehari hari	Jumlah peserta Bimbingan aktivitas hidup sehari hari kewenangan Provinsi	15 Orang

	Pemberian Bimbingan Ketrampilan Dasar	Jumlah orang yang diberikan bimbingan keterampilan dasar kewenangan Provinsi	15 Orang
	Fasilitasi Pembuatan nomor induk kependudukan, kartu tanda penduduk, akta kelahiran, surat nikah, dan/atau identitas anak	Jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah dan/atau identitas anak bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya diluar HIV/AIDS kewenangan Provinsi	15 Orang
	Akses kelayakan Pendidikan dan Kesehatan dasar	Jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan provinsi	15 Orang
	Pemulangan Ke daerah Asal	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya diluar HIV/AIDS yang dipulangkan ke daerah asal kewenangan Provinsi	15 Orang
	Koordinasi, Sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan Rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial) lainnya diluar HIV/AID dan NAPZA	Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan pembinaan rehabilitasi sosial dasar penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam panti	15 Dokumen
C	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	2,75%
1	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Persentase Pengangkatan anak antar WNI dan oleh Orangtua Tunggal	50%
	Pengangkatan Anak antar WNI	Jumlah anak yang mendapatkan orang tua asuh/orang tua angkat sesuai ketentuan yang berlaku kewenangan Provinsi	3 Orang

	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah anak yang mendapatkan orang tua tunggal sesuai ketentuan yang berlaku kewenangan Provinsi	3 Orang
02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Persentase kab/kota yang aktif pemutakhiran DTKS	81,81%
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga Kewenangan Provinsi	10 Keluarga
	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin lintas Kabupaten/Kota	11 Keluarga
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang yang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat kewenangan Provinsi	22 Orang
D	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Korban Bencana sesuai SPM	100,00%
1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapatkan Perlindungan Sosial	100,00%
	Penyediaan Permakanan	Jumlah pengungsi yang mendapatkan permakanan 3x1 hari dalam masa tanggap darurat kewenangan Provinsi	750 Orang

	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana kewenangan Provinsi	300 Orang
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah tempat pengungsian kewenangan Provinsi	3 Unit
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah orang yang mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan kewenangan Provinsi	1 Orang
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan psikososial kewenangan Provinsi	1 Orang
E	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase pewujudan Nilai nilai Kepahlawanan	50%
1	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Persentase Penyelamatan Asset Taman Makam Pahlawan dan nilai nilai kepahlawanan	50%
	Rehabilitasi sarana dan prasarana taman makam pahlawan nasional provinsi	Jumlah dokumen hasil Rehabilitasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana taman makam pahlawan nasional provinsi	3 Dokumen
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah makam yang terpenuhi pemeliharaannya pada taman makam pahlawan nasional Provinsi	1 Makam

	Pengamanan Taman Makam Palawan nasional Provinsi	Jumlah laporan hasil pengamanan taman makam pahlawan nasional provinsi	1 Laporan
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		85%
F	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase pemenuhan pelayanan pendaftaran penduduk	99%
1	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	99%
	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	jumlah dokumen kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk berdasarkan kebijakan nasional yang diterapkan	6 Dokumen
	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Jumlah Dokumen pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi lintas Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi	11 Dokumen
	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Jumlah dokumen hasil tata kelola pelaksanaan pendaftaran penduduk skala Provinsi	4 Dokumen
	Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	Jumlah dokumen hasil pemanfaatan data peristiwa kependudukan	3 Dokumen

	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan penyusunan pelaporan adminduk terkait pendaftaran penduduk yang disusun	11 Dokumen
2	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	75%
	Fasilitasi terkait Pendaftaran Penduduk	jumlah laporan hasil fasilitasi layanan bidang Pendaftaran Penduduk	11 Laporan
	Sosialisasi terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk	2 Laporan
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen hasil komunikasi, informasi dan edukasi terkait pendaftaran penduduk	1 Dokumen
	Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan hasil koordinasi berkala antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah kewenangan Provinsi terkait pendaftaran penduduk	1 Laporan
	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil konsultasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk	11 Laporan
G	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase pelayanan Pendaftaran penduduk dari Kabupaten/ Kota	

1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan terkait pendaftaran penduduk	11 Laporan
	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil bimbingan teknis terkait pendaftaran penduduk	2 Laporan
H	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Pemenuhan Pencatatan Sipil	95%
1	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase pemenuhan pelayanan pencatatan sipil	95%
	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen kebijakan teknis bidang capil ditetapkan	3 Dokumen
	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	Jumlah dokumen hasil penataan tata kelola pelaksanaan pencatatan sipil skala Provinsi	2 Dokumen
	Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen hasil pemanfaatan data atas peristiwa penting	3 Dokumen
	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	jumlah laporan hasil fasilitasi pelayanan bidang pencatatan sipil di kab/kota	11 Laporan

	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan penyusunan pelaporan adminduk terkait pendaftaran penduduk yang disusun	11 Dokumen
2	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Persentase Penyelenggaraan pencatatan sipil	75%
	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil fasilitasi pencatatan sipil	11 Laporan
	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil sosialisasi terkait pencatatan sipil	2 Laporan
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencatatan sipil	1 Dokumen
	Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen hasil koordinasi berkala antar lembaga pemerintah dan non pemerintah kewenangan Provinsi terkait pencatatan sipil	1 Dokumen
	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil konsultasi penyelenggaraan pencatatan sipil	11 Laporan
3	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		#REF!

	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan terkait pencatatan sipil	11 Laporan
	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil Bimbingan Teknis terkait pencatatan sipil	2 Laporan
I	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Administrasi Kependudukan	80%
1	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	80%
	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan penyusunan pelaporan adminduk terkait penelolan informasi administrasi kependudukan	11 Dokumen
	Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil penyusunan tata cara pengelolaan data kependudukan yang bersifat data perseorangan, data agregat, dan data pribadi di provinsi dan kabupten/kota	2 Dokumen
2	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	80%
	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan	11 Laporan

	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil Sosialisasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan	1 Laporan
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen hasil komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat	1 Dokumen
	Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen Hasil koordinasi berkala antar lembaga pemerintah dan non pemerintah kewenangan provinsi	2 Dokumen
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah dokumen hasil pemanfaatan data kependudukan	Dokumen
	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Jumlah dokumen hasil kerjasama organisasi masyarakat dan perguruan tinggi	1 Laporan
	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil konsultasi penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	11 Laporan
3	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Persentase pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan	80%
	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	11 Laporan

	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah sumber daya manusia yang mengikuti bimbingan teknis terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pendayagunaan data kependudukan	Orang
J	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Profile kependudukan	100%
1	Penyediaan Profil Kependudukan	Persentase pemenuhan info profil kependudukan	100%
	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	Jumlah dokumen penyediaan data kependudukan provinsi	2 Dokumen
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	jumlah dokumen penyusunan profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan lain	1 Dokumen
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jambi	Persentase Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan capaian kinerja	
K			

1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kelengkapan dokumen perencanaan	
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	24 Dokumen
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pertanggungjawaban administrasi keuangan	
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	114 Bulan
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semester SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/emester SKPD	18 Dokumen
	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	12 Dokumen
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	
4	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	
	Pengadaan kendaraan perorangan dinas operasional atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas yang disediakan	10 Unit
	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	1 Unit
	Pengadaan mebel	Jumlah Paket mebel yang disediakan	3 Paket
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1Unit

	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan jasa kantor	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	22 Unit
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	4 Unit
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit
7	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Adapun program dan kegiatan yang menjadi rencana kerja pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

NO	Uraian	PAGU ANGGARAN
1	2	3
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	22.567.699.164
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	230.387.719
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	230.387.719
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.727.986.140
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.335.856.140
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	392.130.000
C	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.985.993.127
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	53.852.862
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	649.114.398
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	216.950.550
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.066.075.317
D	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.015.119.000
9	Pengadaan Mebel	70.351.000
E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	773.972.180
10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	535.564.630
11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	238.407.550
F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.549.779.998

12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	860.580.000
13	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	610.699.998
14	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	78.500.000
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	3.524.109.427
G	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	38.261.635
15	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	38.261.635
H	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	3.485.847.792
16	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	401.182.068
17	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	598.321.378
18	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	1.971.466.411
19	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Kewenangan Provinsi	514.877.935
3	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	244.999.126
I	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	244.999.126
20	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Korban Tindak Kekerasan dari titik debarkasi di Provinsi untuk dipulangkan ke daerah kabupaten/kota	244.999.126
4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	17.740.395.292
J	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	7.333.366.070
21	Penyediaan Permakanan	1.893.497.061
22	Penyediaan Sandang	174.906.100
23	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	1.306.654.522
24	Penyediaan Alat Bantu	3.486.133.215

25	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	47.871.784
26	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	161.201.000
27	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	118.102.388
28	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Bagi Penyandang Disabilitas	-
29	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	37.500.000
30	Pemberian Pelayanan Reunifikasi	37.500.000
K	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	4.515.812.018
31	Pengasuhan	2.600.659
32	Penyediaan Permakanan	1.255.992.700
33	Penyediaan Sandang	74.544.390
34	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	2.649.397.664
35	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	3.060.210
36	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	65.717.961
37	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	235.448.434
38	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	129.050.000
39	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	100.000.000
L	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	4.193.905.614
40	Penyediaan Permakanan	1.346.871.600
41	Penyediaan Sandang	160.080.537
42	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	2.507.213.401
43	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	9.872.712
44	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	30.300.000
45	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	69.354.648

46	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Bagi Penyandang Disabilitas	2.700.000
47	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	40.000.000
48	Pemulasaran	59.840.000
49	Koordinasi, sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Dan Pengemis Terlantar di Dalam Pant	37.500.000
M	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Pant	710.619.992
50	Penyediaan Permakanan	203.135.750
51	Penyediaan Sandang	200.227.708
52	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	116.067.360
53	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	103.574.010
54	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	-
55	Pemulangan Ke Daerah Asal	37.500.000
N	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Pant	873.860.314
56	Penyediaan Permakanan	207.635.750
57	Penyediaan Sandang	115.468.015
58	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	361.829.360
59	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Pant	8.940.092
60	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	54.000.000
61	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	38.813.877
62	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	30.173.220
63	Pemulangan Ke Daerah Asal	4.500.000
5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	2.874.315.901
O	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	160.906.446
64	Pengangkatan Anak antar WNI	160.906.446

P	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	2.713.409.455
65	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.040.174.134
66	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	571.300.653
67	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	1.101.934.668
6	PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN BENCANA SOSIAL PROVINSI	1.458.004.746
Q	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	1.458.004.746
68	Penyediaan Permakanan	833.760.456
69	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	289.355.612
70	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	1.138.900
71	Pelayanan Dukungan Psikososial	276.149.778
7	PROGRAM TAMAN MAKAM PAHLAWAN	442.424.144
R	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	442.424.144
72	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	86.952.034
73	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	166.463.070
74	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	189.009.040
6	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	693.223.188
S	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	149.724.466
75	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	80.268.706
76	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/ Kota dalam Satu Provinsi	69.455.760
T	Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pendaftaran kependudukan	346.946.018
77	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	-
78	Bimbingan Teknis Terkait Pendafrtran Penduduk	346.946.018

7	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	570.569.786
U	Pelayanan Pencatatan Sipil	-
79	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	-
V	Pemberian konsultasi penyelenggaraan pencatatan sipil	276.627.450
80	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	276.627.450
8	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	571.449.171
W	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	141.565.514
81	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	68.586.786
82	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	72.978.728
X	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	429.883.657
83	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	197.956.109
84	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	231.927.548
9	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	48.467.778
Y	Penyediaan Profil Kependudukan	48.467.778
85	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	-
86	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan yang lain	48.467.778
	JUMLAH	50.735.657.723

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) merupakan salah satu dokumen perencanaan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), untuk itu maka Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi menyusun rancangan Rencana Kerja Tahun 2023 ini sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun mendatang sekaligus sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi.

Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah Provinsi Jambi.
2. Penyusunan Renja Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi ini berpedoman pada Renstra Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi 2021-2026, seluruh program dan kegiatan berserta indikator pada Renstra untuk tahun 2023 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penambahan output/keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis.
3. Penyusunan Renja ini juga berpedoman pada RKPD Provinsi Jambi, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.
4. Renja Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Provinsi Jambi Tahun 2023.
5. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh inspektorat Provinsi Jambi,

begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Provinsi Jambi.

6. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2023.

Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi tahun 2023 ini merupakan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi untuk tahun 2023 telah dijabarkan ke dalam program dan kegiatan tahun 2023 sebagaimana tersebut diatas.

Dalam melaksanakan Rencana Kerja yang telah ditetapkan tersebut, Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi juga memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari Dinas/Instansi/Lembaga terkait dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta Pemerintah Pusat. Keberhasilan dari pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi ini akan tergambar dalam Laporan Kinerja Instansi (LKj).

Jambi, Desember 2022
Kepala Dinas

ARIEF MUNANDAR, SE
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19670307 199903 1 004